

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan	: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	: Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang 3. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 4. Meningkatnya tata kelola pertanahan 5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik 2. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang 3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 4. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan 5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)	Formulasi Perhitungan : Indeks Ketersediaan Fisik + Indeks Kualitas Fisik + Indeks Kesesuaian + Indeks Pemanfaatan + Indeks Kontribusi terhadap Perekonomian Definisi Operasional : Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna atau masyarakat terhadap kualitas penyediaan dan pelayanan infrastruktur publik (jalan, air bersih, sanitasi, bangunan gedung pemerintah, layanan PBG)	Hasil Survey	
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-rata (Persentase Jalan Kota Mantap + Persentase Penduduk Akses Air Bersih + Persentase Penduduk Akses Sanitasi + Persentase Irigasi Kondisi Mantap + Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik + Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik + Persentase Bangunan Dalam Kondisi Baik + Persentase Layanan PBG) Persentase Jalan Kota Mantap = $\frac{\text{Panjang Jalan Kota Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kota di Probolinggo}} \times 100\%$ Persentase Penduduk Akses Air Bersih = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Mengakses Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Probolinggo}} \times 100\%$ Persentase Penduduk Akses Sanitasi = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Probolinggo}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang SDA, Bidang Cipta Karya, Bidang PKP, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

			Persentase Irigasi Kondisi Mantap = $\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi di Kota Probolinggo}} \times 100\%$ Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik = $\frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jalan Lingkungan di Kota Probolinggo}} \times 100\%$ Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik = $\frac{\text{Panjang Drainase Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Drainase Lingkungan di Kota Probolinggo}} \times 100\%$ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Kondisi Baik = $\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dibangun dan dipelihara}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah}} \times 100\%$ Persentase Layanan PBG = $\frac{\text{Jumlah Penerbitan Rekomendasi PBG}}{\text{Jumlah Permohonan PBG}} \times 100\%$		
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR}}{\text{Total luas wilayah terencana}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
4.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah di wilayah kota}} \times 100\%$ Keterangan: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi fisik yang baik (tidak kumuh, memiliki sanitasi dan air bersih, serta cukup ventilasi), dengan biaya tempat tinggal yang tidak melebihi 30% dari pendapatan rumah tangga, serta berada di lokasi yang aman dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan transportasi.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Tanah PSU}}{\text{Jumlah Tanah PSU}} \times 100\%$ Diserahkan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo



Setiorini Sayekti, S.K.M., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197405271997032002

